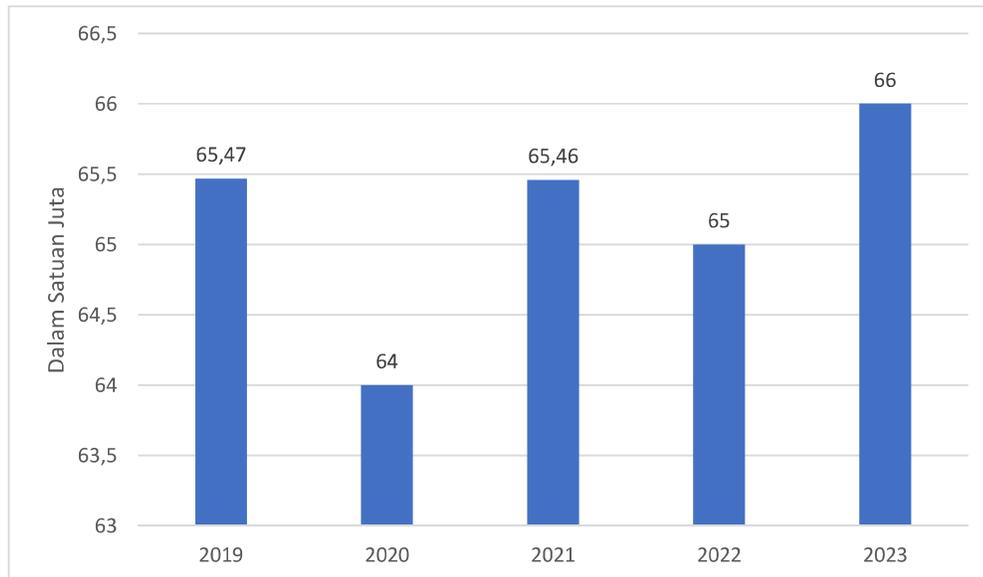


BAB I PENDAHULUAN

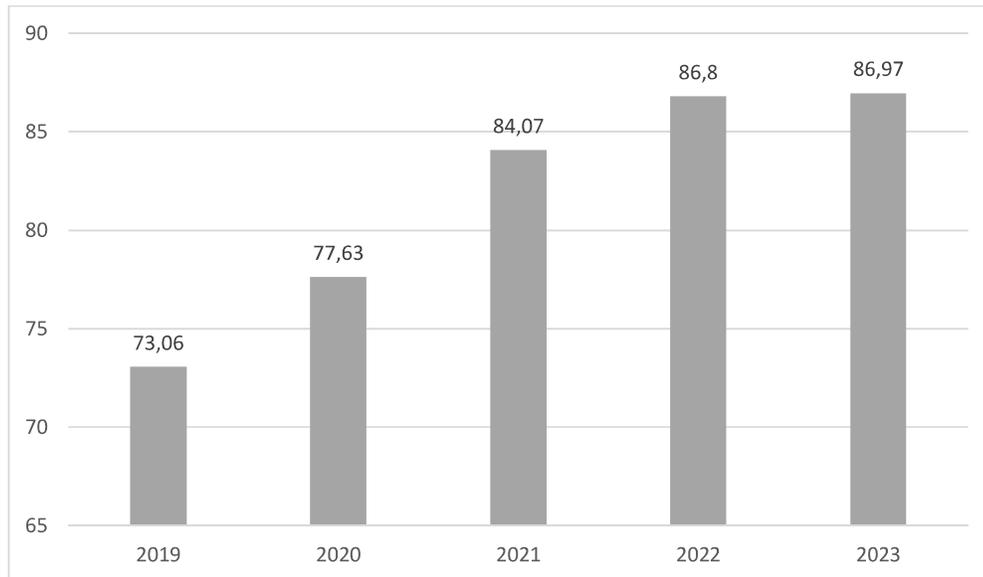
1.1 Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki visi untuk Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Salah satu strategi utama DJP dalam mencapai visi tersebut adalah dengan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Kepatuhan pajak menjadi faktor krusial dalam pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam realitasnya, kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih belum mencapai tingkat yang diharapkan.



Gambar 1.1 Statistik Pertumbuhan UMKM Di Indonesia

Sumber : Databoks, Otoritas Jasa Keuangan, 2024



Gambar 1.2 Statistik Rasio Kepatuhan Laporan Pajak Di Indonesia

Sumber : Direktorat Jendral Pajak, 2024

Berdasarkan data pada grafik, jumlah UMKM di Indonesia mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada satu periode namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, rasio kepatuhan laporan pajak menunjukkan tren yang terus meningkat, mencerminkan adanya peningkatan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan ekonomi yang mempengaruhi jumlah UMKM dan penerimaan pajak, kepatuhan pajak tetap mengalami peningkatan, kemungkinan berkat kebijakan perpajakan yang mendukung kondisi ekonomi yang terjadi.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor UMKM, DJP menginisiasi program *Business Development Services* (BDS), yang bertujuan memberikan edukasi, pelatihan, serta fasilitas lain guna mendukung pertumbuhan usaha UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, DJP juga bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Kementerian BUMN, marketplace online, dan penyedia layanan pembayaran digital untuk memperluas jangkauan edukasi pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2019)

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, di antaranya adalah kesadaran

wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam membentuk sikap patuh, sementara pemahaman terhadap regulasi pajak dapat meminimalkan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang percaya bahwa pajak digunakan secara transparan dan adil cenderung lebih patuh. Berikut beberapa kasus Pemerintah yang mencederai integritasnya sebagai pejabat Negara :

Tabel 1.1 Kasus Korupsi Di Indonesia

No	Kasus	Deskripsi Singkat	Kerugian Negara	Tahun Kejadian
1	Kasus Hasto Kristiyanto	Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap KPK atas dugaan suap dan menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku.	Tidak disebutkan	2025
2	Korupsi Minyak Mentah Pertamina	Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola minyak mentah di Subholding Pertamina.	Rp193,7 triliun	2025
3	Korupsi Eks Pejabat Pajak	Mantan pejabat DJP Mohamad Haniv diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus.	Tidak disebutkan	2025

Sumber: Reuter, Kompas, Tirto, 2025

Tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tingkat kepatuhan pajak, karena masyarakat merasa bahwa dana yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik dan tidak dikembalikan dalam bentuk layanan publik yang optimal. Selain itu, tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dapat semakin memperburuk pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mengurangi motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi pengelolaan pajak, serta menyederhanakan prosedur administrasi agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Tabel 1.2 Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2019 – 2023

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp triliun)	Pertumbuhan
2019	1.332,67	1,5 %
2020	1.072,11	-19,6%
2021	1.278,63	19,3%
2022	1.716,77	34,3%
2023	1.869,23	8,9%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2024

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak nasional mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, meskipun sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun, pertumbuhan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung perekonomian nasional

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM telah banyak dilakukan, tetapi masih ditemukan hasil yang berbeda-beda. Faradhila & Fadhila (2021) menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hasil ini sejalan dengan penelitian Herdiatna & Lingga (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Kesimpulan dari kedua penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta kesadarannya terhadap kewajiban membayar pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Hasibuan & Harefa (2023) berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan UMKM Membayar Pajak Penghasilan Di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya kepercayaan kepada pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan tidak memiliki

pengaruh yang signifikan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, faktor kepercayaan kepada pemerintah dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah mengelola pajak dengan transparan dan adil, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika kepercayaan terhadap pemerintah rendah, kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan saja mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan pajak.

Selain itu, penelitian Sulistyowati *et al.* (2024) yang dilakukan di Kecamatan Kemayoran menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan kualitas layanan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Hasibuan & Harefa (2023) yang menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah justru menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak UMKM masih belum dapat disimpulkan secara pasti, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara variabel ini.

Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan lokasi penelitian, karakteristik UMKM, kondisi sosial dan ekonomi, serta kebijakan pajak yang diterapkan di masing-masing daerah. Penelitian di Kota Banda Aceh dan Bandung menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sementara penelitian di Medan menunjukkan bahwa faktor kepercayaan kepada pemerintah lebih dominan. Sementara itu, penelitian di Kecamatan Kemayoran menemukan bahwa faktor kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan, tetapi pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, Perbedaan hasil penelitian di berbagai daerah mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Selain itu, meskipun UMKM memiliki peran penting dalam

perekonomian nasional, tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah, yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Cibarusah)**

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak di kalangan pelaku UMKM, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang membuat pelaku UMKM kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Persepsi negatif terhadap pajak yang menyebabkan sikap apatis dan keengganan dalam membayar pajak.
4. Tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah yang masih perlu ditingkatkan agar kepatuhan pajak dapat meningkat.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dan kejelasan data yang akan dibahas maka penulis menggunakan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM.
2. Unit analisis penelitian difokuskan pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Cibarusah serta didukung oleh data sekunder dari instansi terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Cibusah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana ketiga variabel tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM serta memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM serta menyusun rekomendasi atau saran kebijakan yang dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka

1.5.2 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk menganalisis apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk menganalisis apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi dalam laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa pengertian dan definisi dari kutipan buku dan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. yang berkaitan dengan skripsi, beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, kerangka pemikiran dan juga hipotesis mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang secara lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi buku, jurnal, dan rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini